



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Selawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia pada tingkat yang sangat mulia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024, perjanjian kinerja dan Pernyataan Perjanjian Kinerja 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang dapat disusun dan diselesaikan.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang ini berpedoman pada perencanaan strategik, DPA-SKPD, data realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Dengan telah disusunnya LKIP tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi kontribusi sebagai bahan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, maupun untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun berikutnya. Namun demikian kami tidak lupa berterima kasih kepada yang telah membantu pemikiran sehingga selesai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun ini

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dan dapat dipergunakan seperlunya.

Sabang, 13 Maret 2025

★ KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SABANG.



**ISWANDI, S.STP, M.SI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19751010 199511 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Defenisi tata pemerintahan yang baik (*good government*) adalah suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan membuka partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya tata kelola pelayanan masyarakat yang baik (*good governance*), maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang berkewajiban melaporkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan yang disebabkan dari segala kebijakan atau keputusan yang dibuat melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diterimanya dalam sebuah Laporan Kinerja Tahunan.

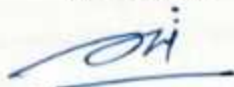
Laporan Kinerja Tahunan yang disebut sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang akan terus meningkatkan kualitas pegawainya, akan terus menerus mengembangkan ide-ide dan gagasan baru guna mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

Sabang, 13 Maret 2024

✦ KEPALA DINAS SOSIAL, PMG, PPPA  
KOTA SABANG



ISWANDI, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19751010 199511 1 001